



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kami semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020 ini.

Dengan penyelesaian Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020 ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada yang telah membantu dalam penyusunannya terutama kepada :

1. Semua pihak yang terkait di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah banyak memberikan informasi, pemikiran serta masukan-masukan yang berguna dalam penyelesaian Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020 ini.
2. Semua pihak di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah khususnya di Bidang Akuntansi yang selalu memberikan bimbingan dan kritikan yang sangat bermanfaat bagi kami dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020 ini.

Dalam menyusun Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020 ini, kami banyak menemukan permasalahan dan kelemahan. Oleh sebab itu, kami tetap mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020 ini sehingga kedepan kami dapat menyajikan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara akuntabilitas.





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Jl. Soekarno - Hatta Telp. (0753) 7464014 Fax. (0753) 7464014

Simpang Empat - Pasaman Barat

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi APBD,
- (b) Laporan Operasional (LO)
- (c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- (d) Neraca,
- (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang *memadai*, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Simpang Empat , Januari 2021

KEPALA



SAIFUDDIN ZUHRI, S.Pd, MM

NIP. 19651226 198908 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	iv
LAPORAN OPERASIONAL	v
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	viii
NERACA	x
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan catatan atas laporan keuangan	4
Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	5
2.1 Penjelasan Atas Kinerja Pendapatan	5
2.2 Penjelasan Atas Posisi Keuangan Entitas	5
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target	9
Bab III Kebijakan Akutansi	10
Bab IV Penjelasan pos - pos laporan keuangan	25
4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
4.1.1 Pendapatan	25
4.1.2 Belanja	26
4.2 Penjelasan atas pos - pos laporan Operasional	34
4.3 Penjelasan atas pos - pos laporan Perubahan Ekuitas	51
4.4 Penjelasan atas pos - pos Neraca	54
Bab V Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan	70
Bab VI Penjelasan Penting Lainnya	75
Bab VII Penutup	78
Lampiran	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4
 Bidang Pemerintahan : 4.05
 Unit Organisasi : 4.05.07
 Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Kepegawaian
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA				
		0,00	0,00	0,00	170.516.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA				
		0,00	0,00	0,00	170.516.000,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	170.516.000,00
5	BELANJA				
		6.264.601.581,00	6.010.426.839,00	95,94	8.697.044.709,00
5.1	BELANJA OPERASI				
		6.028.141.581,00	5.775.096.839,00	95,80	8.697.044.709,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.575.942.028,00	3.474.119.182,00	97,15	3.340.094.257,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.452.199.553,00	2.300.977.657,00	93,83	5.356.950.452,00
5.2	BELANJA MODAL				
		236.460.000,00	235.330.000,00	99,52	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.600.000,00	36.400.000,00	99,45	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.860.000,00	198.930.000,00	99,53	0,00
5.2.8	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.264.601.581,00)	(6.010.426.839,00)	95,94	(8.526.528.709,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.264.601.581,00)	(6.010.426.839,00)	95,94	(8.526.528.709,00)

Simpang Empat, 31 Desember 2020
Kepala BKPSDM

SAIFUDDIN ZUHRI, S.Pd, MM
 NIP. 196512261989081001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.05 Kepegawaian
Unit Organisasi : 4.05.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	0,00	170.516.000,00	(170.516.000,00)	(100,00)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	170.516.000,00	(170.516.000,00)	(100,00)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	170.516.000,00	(170.516.000,00)	(100,00)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	6.419.626.998,33	9.442.277.314,33	(3.022.650.316,00)	(32,01)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	3.475.635.154,00	3.339.739.257,00	135.895.897,00	4,07
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	2.298.741.684,00	5.359.299.317,00	(3.060.557.633,00)	(57,11)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	645.250.160,33	743.238.740,33	(97.988.580,00)	(13,18)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian
Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(6.419.626.998,33)	(9.271.761.314,33)	2.852.134.316,00	(30,76)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.4	Defisit Penurunan investasi - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.5	Defisit Penghapusan Aset Tetap - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.6	Defisit Penghapusan Aset Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(6.419.626.998,33)	(9.271.761.314,33)	2.852.134.316,00	(30,76)
POS LUAR BIASA					
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(6.419.626.998,33)	(9.271.761.314,33)	2.852.134.316,00	(30,76)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.05 Kepegawaian
Unit Organisasi : 4.05.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
----------	--------	---------------	---------------	--------------------------	-----



Simpang Empat, 31 Desember 2020

Kepala BKPSDM

SAIFUDDIN ZUHRI, S.Pd, MM

NIP. 196512261989081001

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 05	Kepegawaian
Unit Organisasi : 4 . 05 . 07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	10.306.286.879,33	11.050.912.284,66
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.419.626.998,33)	(9.271.761.314,33)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi akumulasi Penyusutana aset Tetap	(206.715.685,00)	0,00
Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00	0,00
Koreksi Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Koreksi Piutang TP	0,00	0,00
Koreksi Piutang TPGR	0,00	0,00
Koreksi Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Utang Jk Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Piutang Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Koreksi Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Utang Jk Pendek	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Transfer Keluar Kas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang lainnya	0,00	0,00
Transfer Keluar Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Transfer Keluar Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Aset Tetap	(300.000,00)	0,00
Transfer Keluar Aset Tetap/ Hibah/Double Catat/Penghapusan Aset	(267.370.000,00)	0,00
Transfer Masuk Kas Lainnya	0,00	0,00
Transfer Masuk Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan	0,00	0,00
Transfer Masuk Aset Tetap/Hibah/Kurang Catat/Tambah Aset NJOP	2.697.920.910,00	792.000,00
Koreksi Pendapatan BLUD	0,00	0,00
Transfer Kas Masuk	0,00	0,00
Transfer Kas Keluar	0,00	0,00
Koreksi Beban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Dana Bos	0,00	0,00
Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan	0,00	(184.800,00)
Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Koreksi Beban di Bayar di Muka	0,00	0,00
Koreksi Pendapatan	0,00	0,00
Transfer Keluar Beban Tak Terduga	0,00	0,00
Transfer Masuk Beban Tak Terduga	323.229.040,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.010.426.839,00	8.526.528.709,00
EKUITAS AKHIR	12.443.850.985,00	10.306.286.879,33

Urusan Pemerintahan	: 4.05	Kepegawaian
Unit Organisasi	: 4.05.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 4.05.07.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
URAIAN		2020
		2019

Simpang Empat, 31 Desember 2020
Kepala BKPSDM

SAIFUDDIN ZUHRI, S.Pd, MM
 NIP. 196512261989081001



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Per 31 December 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Dana Bergulir Diragukan tertagih	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	385.075.960,00	385.075.960,00
Peralatan dan Mesin	4.980.230.750,00	4.591.205.650,00
Gedung dan Bangunan	12.657.901.108,00	10.054.836.258,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	259.517.000,00	259.817.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.320.000,00	55.300.000,00
Akumulasi Penyusutan	(5.894.876.147,00)	(5.061.900.135,00)
Aset Tetap BOS	0,00	0,00
Aset Tetap BLUD	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	12.438.168.671,00	10.284.334.733,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	17.151.250,00	36.141.083,33
Aset Lain-lain	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4.05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Unit Organisasi : 4.05.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

URAIAN	2020	2019
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	17.151.250,00	36.141.083,33
JUMLAH ASET	12.455.319.921,00	10.320.475.816,33
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	11.468.936,00	14.188.937,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.468.936,00	14.188.937,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	11.468.936,00	14.188.937,00
EKUITAS		
EKUITAS	12.443.850.985,00	10.306.286.879,33
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	12.455.319.921,00	10.320.475.816,33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan disusun adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Secara spesifik tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Sumber daya tersebut antara lain sumber dana untuk menjalankan aktivitas pemerintahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan penggunaan dana adalah untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer.

Dalam Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berupa :

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu Laporan yang menyajikan informasi realisasi dan anggaran entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Disamping itu menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan Operasional (LO), adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas, yang pencatatannya tidak semata-mata hanya berdasarkan atas keluar masuknya uang. Dalam LO unsur pendapatan akan dicatat apabila proses dalam menghasilkan pendapatan tersebut sudah selesai tanpa memperhatikan diterimanya kas oleh entitas. Demikian juga dengan beban akan dicatat pada saat terjadinya. Dengan demikian LO dihasilkan dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), ialah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atau perubahan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca, yaitu merupakan suatu laporan yang menunjukkan posisi keuangan daerah per tanggal laporan. Neraca Daerah harus mengungkapkan jumlah-jumlah aset (hak yang harus diterima) dan kewajiban yang harus dibayar.

Neraca Daerah juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas.

Catatan atas Laporan Keuangan, dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memungkinkan para pembaca salah dalam memahami informasi tersebut, untuk menghindari kesalahpahaman dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan.

Catatan Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 04 adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan dengan tujuan :

1. Laporan Keuangan mudah dipahami.
2. Menghindari kesalahpahaman.
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting.
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas.
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*)

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara yang mengamanatkan desentralisasi Laporan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penyusunan dan Penyajian laporan keuangan daerah bersumber kepada pedoman/peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan, dan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program
- Bab III Kebijakan Akuntansi**, menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan
- Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan atas Informasi – Informasi Laporan Non Keuangan**, menjelaskan gambaran umum daerah dan penjelasan pengungkapan lainnya
- Bab VI Penutup**

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Penjelasan atas Kinerja Pendapatan

Kinerja Pendapatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat adalah Rp.0,00 karena tidak terdapat target pendapatan untuk Tahun Anggaran 2020 (Refocusing Anggaran Pandemi Covid 19).

2.2. Penjelasan atas Posisi Keuangan Entitas

Pada Tahun Anggaran 2020, Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dianggarkan sebesar Rp.6.264.601.581,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.010.426.839,00 atau 95,94%.

Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 4 Program dan 21 Kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri atas 3 kegiatan dengan indikator capaian program berupa meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, indikator masukan yaitu dana total Rp.1.028.841.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	703.000.000,00
2	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	227.359.000,00
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	98.482.500,00
	JUMLAH		1.028.841.500,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri atas 2 kegiatan dengan indikator capaian program berupa meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, indikator masukan yaitu dana total Rp.236.460.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Pengadaan/ pembangunan gedung kantor dan rumah jabatan/ dinas	1 paket	199.860.000,00
2	Pengadaan peralatan/ kendaraan dan mesin	2 paket	36.600.000,00
	JUMLAH		236.460.000,00

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terdiri dari 4 kegiatan indikator capaian program meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dengan masukan yaitu total dana Rp.337.630.000 ,00.

Tabel 3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 orang	5.500.000,00
2	Pendidikan dan pelatihan PIM II dan PIM III	14 orang	277.095.000,00
3	Pendidikan dan pelatihan PIM IV	40 orang	32.590.000,00
4	Pendidikan dan pelatihan prajabatan/ pelatihan dasar bagi CPNS	244 orang	22.445.000,00
	JUMLAH		337.630.000,00

4. Program Pendidikan Kedinasan

Terdiri dari 1 kegiatan indikator capaian program meningkatnya pendidikan dan pengetahuan aparatur dengan masukan yaitu total dana Rp.14.305.000,00

Tabel 4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Seleksi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	150 orang	14.305.000,00
	JUMLAH		14.305.000,00

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terdiri dari 11 kegiatan dengan indikator capaian program meningkatnya pengelolaan, pelayanan kepegawaian daerah dengan indikator masukan yaitu total dana Rp.1.097.498.053,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	2 kali	44.350.000,00
2	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	3 dokumen	23.375.000,00
3	Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	12 kali	27.150.000,00
4	Proses Penyelenggaraan Administrasi kepangkatan	900 SK	45.390.000,00
5	Pelayanan Administrasi dan Operasional UPT Diklat	12 bulan	187.875.000,00
6	Pelayanan administrasi pengurusan pensiun	125 orang	29.800.000,00
7	Penyediaan administrasi dan operasional Korpri	12 bulan	27.110.000,00
8	Penempatan PNS dan pengelolaan jabatan fungsional tertentu	500 SK	28.950.000,00
9	Penyelenggaraan pengadaan ASN	3 dokumen	594.638.053,00
10	Pengelolaan Kartu Identitas Kepegawaian	450 berkas	24.750.000,00
11	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepegawaian	2 dokumen	64.110.000,00
	JUMLAH		1.097.498.053,00

Adapun rincian realisasi keuangan perkegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Realisasi Keuangan Perkegiatan Tahun 2020

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.,	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	703.000.000	653.258.347	92,92
2.,	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	227.359.000	221.034.400	97,22
3.,	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	98.482.500	98.336.705	99,85
4.,	Pengadaan/ pembangunan gedung kantor dan rumah jabatan/ dinas	1 paket	199.860.000	198.930.000	99,53
5.,	Pengadaan peralatan/ kendaraan dan mesin	2 paket	36.600.000	36.400.000	99,45
6.,	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 orang	5.500.000	4.487.000	81,58
7.,	Pendidikan dan pelatihan PIM II dan PIM III	10 orang	277.095.000	276.680.000	99,85
8.,	Pendidikan dan pelatihan PIM IV	40 orang	32.590.000	30.063.550	92,25
9.,	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Bagi CPNSD	244 orang	22.445.000	22.000.000	98,02
10.,	Seleksi ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas	77 orang	14.305.000	13.894.000	97,13
11.,	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	25 kali	44.350.000	44.235.990	99,74
12.,	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	3 dokumen	23.375.000	16.234.746	69,45
13.,	Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	14 kali	27.150.000	26.530.000	97,72
14.,	Proses Penyelenggaraan Administrasi kepangkatan	800 SK	45.390.000	45.002.250	99,15
15.,	Pelayanan Administrasi dan Operasional UPT Diklat	12 bulan	187.875.000	169.929.460	90,45
16.,	Pelayanan administrasi pengurusan pensiun	100 orang	29.800.000	27.171.163	91,18
17.,	Penyediaan administrasi dan operasional Korpri	12 bulan	27.110.000	26.406.200	97,40
18.,	Penempatan PNS dan pengelolaan jabatan fungsional tertentu	500 SK	28.950.000	28.626.000	98,88
19.,	Penyelenggaraan pengadaan ASN	1 kali	594.638.053	581.254.246	97,75
20.,	Pengelolaan Kartu Identitas Kepegawaian	450 kartu	24.750.000	24.353.800	98,40
21.,	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepegawaian	2 kali	64.110.000	17.278.300	26,95
	JUMLAH		2.714.734.553	2.562.106.157	94,38

2.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

Dari 21 Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, terdapat 2 kegiatan yang realisasinya cukup rendah/tidak mencapai 75% dari total pagu dana yang telah disediakan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembangunan/ pengembangan system informasi kepegawaian daerah hanya terealisasi 69,45% atau sebesar Rp.16.234.746,00 dari total anggaran Rp.23.375.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat rekening berupa biaya hosting aplikasi yang belanjanya lebih rendah dari tahun sebelumnya sehingga serap anggarannya menjadi sedikit.
- b. Kegiatan Evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja kepegawaian hanya terealisasi 26,95% atau sebesar Rp.17.278.300,00 dari total anggaran Rp.64.110.000,00. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat masalah yaitu tidak terlaksananya rapat/sidang karena verifikasi TPP tiap bulannya dilaksanakan mandiri oleh OPD sehingga Tim Kabupaten tidak lagi melakukan rapat TPP akibat dari peraturan pembatasan tatap muka yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Entitas akuntansi merupakan unit Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya dalam hal ini, yang akan dibahas adalah entitas pengelola anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat.

B. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan berdasarkan atas Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu kepada peraturan Bupati tersebut yang berbasis akrua.

1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

- a) Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah laporan yang menyediakan informasi tentang sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b) Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- c) Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi serta mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- e) Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Standar akuntansi yang dipergunakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai *standart setter* akuntansi pemerintah dan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat adalah :

- a. Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO
- c. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah Laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih atau

kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

- d. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memerhatikan saat kas diterima atau dibayar.

3. Definisi

a. Neraca

Neraca Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu dan menyajikan secara komparatif dengan periode-periode sebelumnya.

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tersebut terdiri dari :

- a) **Aset Lancar** adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar ini meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek (deposito berjangka 12 bulan kebawah), Piutang dan Persediaan.

- b) **Investasi Jangka Panjang**, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

- (1) Investasi nonpermanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti; pembelian Surat Utang Negara, Penanaman Modal dalam Proyek

Pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan investasi non permanen lainnya.

- (2) **Investasi Permanen** yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara dan badan hukum lainnya.

c) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum berupa :

- (1) Tanah
- (2) Peralatan dan Mesin
- (3) Gedung dan Bangunan
- (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- (5) Aset tetap lainnya
- (6) Konstruksi dalam pengerjaan

Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN atau APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aktiva lainnya dan dari rampasan.

- d) Dana cadangan**, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- e) Aset Lainnya** adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Aset lainnya antara lain meliputi aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih 12 bulan dan aset kejasama dengan pihak ketiga (kemitraan)

2) **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a) **Kewajiban Jangka Pendek**, merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek mencakup Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), Utang Belanja, Utang Pajak, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga.
- b) **Kewajiban Jangka Panjang**, merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang jangka panjang meliputi Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri.

3) **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih lebih dari aktiva atas Utang.

Saldo ekuitas di neraca berasal dari Saldo Akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

b. **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif antara anggaran dan realisasi. Laporan Realisasi anggaran mencakup pos-pos sebagai berikut :

- 1) **Pendapatan – LRA** adalah penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) **Belanja** semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 3) **Transfer** penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- 4) **Suplus atau Defisit – LRA** adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan-LRA dan belanja daerah selama satu periode pelaporan.
- 5) **Pembiayaan** terdiri Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun

pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, baik tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

c. Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

- 1) **Aktivitas operasi**, adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi
- 2) **Aktivitas Investasi**, adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas
- 3) **Aktivitas pendanaan**, adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan / atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang
- 4) **Aktivitas Transitoris**, adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

5) Pengakuan

1) Aset

- a) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- b) Aset diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikan dan atau penguasaannya berpindah.
- c) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- d) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan
- e) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya
- f) Piutang daerah diakui pada saat (a) diterbitkan surat ketetapan (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan (c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode

- g) Persediaan diakui pada saat (a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 - h) Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*)
 - i) Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Hal yang harus dipenuhi adalah berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.
- 2) Kewajiban
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul
- 3) Pendapatan - LRA
- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 - b. Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan SKPD
 - c. Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara.
- 4) Belanja
- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
 - b) Belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - c) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah, pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah

ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

5) Pembiayaan

- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
- b) Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

6) Beban

- a) Beban pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme LS pengakuan bebannya diakui pada saat :
 - 1. Untuk belanja pegawai diakui berdasarkan tanggal tagihan yaitu pada saat pengguna anggaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), seperti belanja Gaji PNSD, Tambahan Penghasilan Pegawai, Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru dan lain-lainnya
 - 2. Untuk belanja barang dan jasa pengakuannya terbagi atas :
 - a. Untuk belanja yang sifatnya tidak melalui perjanjian/ perikatan dengan pihak ketiga/ rekanan maka tanggal pengakuannya berdasarkan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seperti belanja jasa pihak ketiga untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap, belanja perjalanan dinas dll
 - b. Belanja Barang dan jasa yang proses pembayarannya atas dasar perjanjian/ perikatan dengan pihak ketiga yaitu melalui Surat Pesanan (SP) dan kontraktual dan pembayaran yang dilaksanakan maka pengakuannya adalah berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima barang/ hasil pekerjaan seperti : Belanja Sewa, Belanja penggandaan/ cetak yang dilaksanakan melalui surat pesanan
 - c. Belanja barang dan jasa yang proses pembayarannya muncul karena perjanjian/ perikatan dan proses pembayarannya dengan termin, maka pengakuannya yaitu:
 - Termin diakui berdasarkan tanggal berita acara pembayaran

- Non Termin (pelunasan pembayaran 100%) pengakuannya berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima

d. Belanja barang dan jasa yang dibayarkan melalui dana kapitalisasi JKN diakui sebagai beban susai dengan tanggal pengesahan SP2D yang dilaksanakan fungsi perbendaharaan

3. Untuk belanja modal pengakuan bebannya terbagi atas :

a. Pembayaran termin diakui berdasarkan atas tanggal berita acara pembayaran

b. Sedangkan pembayaran non termin (pelunasan 100%) pengakuannya berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima/ PHO

b) Beban pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme GU pengakuan bebannya diakui pada saat tanggal pembayaran

7) Pendapatan – LO

Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan serta pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai maupun yang masih piutang.

8) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

9) Piutang

Piutang diakui saat diterbitkannya surat ketetapan atau telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

6) Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing, dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1) Pengukuran Aset

a) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal

b) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan

c) Piutang,

Piutang dicatat sebesar nilai nominal

d) Persediaan

Persediaan dicatat sebesar :

- (1) Harga Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- (3) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/
rampasan

e) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya seperti penyertaan modal Pemerintah Daerah, dinilai dengan menggunakan tiga metode yaitu:

- (1) Metode biaya apabila penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan kepemilikan kurang dari 20%;
- (2) Metode ekuitas apabila penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan kepemilikan 20% sampai 50% lebih atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan; dan
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
- (4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki

berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

f) Aset tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga Perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga Aktiva tetap tersebut siap digunakan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- (5) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- (a) Batasan kapitalisasi untuk peralatan dan mesin selain alat berat sebesar Rp.300.000,00
- (b) Batasan kapitalisasi Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp.1.000.000,00;
- (c) Batasan kapitalisasi gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00
- (d) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

3) Pendapatan- LRA

Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. Pendapatan perpajakan – LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan yang dicatat tanpa dikurangkan / dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4) Pendapatan- LO

Pendapatan – LO operasional non pertukaran diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Sedangkan Pendapatan – LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

5) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

6) Belanja

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

7) Beban

Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

8) Transfer

pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

9) Piutang

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

10) Surplus atau Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

11) Pembiayaan

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Pembiayaan dilaksanakan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak tercatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

12) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap :

- a. Peralatan dan mesin
- b. Gedung dan Bangunan
- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- d. Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 menurut SAP terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tersebut, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1 PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja menggambarkan pencapaian anggaran yang telah ditetapkan selama satu tahun yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Laporan ini menyediakan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dibandingkan dengan anggarannya.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 dapat digambarkan pada uraian berikut ini :

4.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2020 bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 tahun 2013 tentang Penggunaan gedung Diklat, namun untuk tahun 2020 tidak terdapat target dan realisasi karena Refocusing Anggaran.

Pendapatan Asli Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah atas penggunaan gedung UPT Diklat yang berlokasi di Kecamatan Talamau yang tarif retribusinya berdasarkan atas Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 tahun 2013 tentang Penggunaan gedung Diklat yang tarif perhitungannya adalah :

1. Untuk fasilitas gedung terinci sebagai berikut :
 - Ruang Belajar Rp100.000,00 / hari
 - Kamar / Penginapan Peserta Rp15.000,00 / orang / hari
 - Kamar/ penginapan narasumber/ widyaiswara Rp.100.000,00/ orang/ hari
 - Alat alat makan minum Rp3.000,00 / orang / hari
2. Untuk Pemakaian fasilitas ruang pertemuan / aula dan LCD Proyektor pada gedung UPT Diklat disesuaikan dengan besarnya retribusi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

4.1.2 BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2020, Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dianggarkan sebesar Rp.6.264.601.581,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.010.426.839,00 atau 95,94%.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja tahun 2020 dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
- b. Belanja Modal
 - Belanja Tanah
 - Belanja Peralatan dan Mesin
 - Belanja Gedung dan Bangunan
 - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Belanja Aset Tetap Lainnya

Rencana dan realisasi belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp. 6.028.141.581,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.775.096.839,00 atau 95,80% dari anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.8.697.044.709,00

realisasi belanja operasi tahun 2020 turun sebesar Rp.2.921.947.870,00 atau 33,59%.

Rencana dan Realisasi Belanja Operasi TA 2020 terdiri dari:

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.3.575.942.028,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.474.119.182,00 atau 97,15% dari anggaran.

Belanja pegawai ini merupakan total belanja pegawai dari belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp.3.340.094.257,00 Belanja Pegawai tahun 2020 naik sebesar Rp.134.024.925,00 atau 4%.

Naiknya realisasi belanja pegawai disebabkan karena adanya perubahan besaran belanja tunjangan berdasarkan beban kerja sesuai dengan perubahan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang TPP.

Sesuai dengan kelompok belanja pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 6
Belanja Pegawai Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai Tidak Langsung	3.549.867.028,00	3.448.320.682,00	97,14
2	Belanja Pegawai Langsung	26.075.000,00	25.798.500,00	98,94
	Jumlah	3.575.942.028,00	3.474.119.182,00	97,15

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp.3.448.320.682,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 8
Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.633.792.000	1.600.950.140,00	97,99
2	Tunjangan Keluarga	157.617.800	153.103.494,00	97,14
3	Tunjangan Jabatan	183.335.000	178.545.000,00	97,39
4	Tunjangan Fungsional Umum	42.980.000	43.070.000,00	100,21
5	Tunjangan Beras	84.130.800	82.196.700,00	97,70
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.531.990	2.059.473,00	58,31
7	Pembulatan Gaji	39.438	24.155,00	61,25
	Total Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.105.427.028	2.059.948.962	97,84
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.444.440.000	1.388.371.720,00	96,12
	Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung	3.549.867.028	3.448.320.682	97,14

Gaji Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan sebagai berikut:

1	Golongan IV	4 orang
2	Golongan III	29 orang
3	Golongan II	3 orang
	Jumlah	36 orang

Rincian Belanja Pegawai Langsung terdiri atas :

Tabel 9**Belanja Pegawai Langsung Tahun 2020**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Uang Lembur PNS	10.775.000	10.597.500	98,35
2	Uang Lembur Non PNS	15.300.000	15.201.000	99,35
	Jumlah	26.075.000	25.798.500	98,94

Jika dibandingkan dengan penetapan Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat nilai belanja langsung pegawai adalah senilai Rp.524.000.000,00 terdapat perbedaan senilai Rp.497.925.000,00 yang disebabkan karena pada laporan realisasi anggaran berbasis akrual ada rincian objek belanja pegawai langsung menjadi barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10**Belanja Pegawai langsung yang menjadi belanja barang dan jasa tahun 2020**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.425.000	47.350.000	99,84
2	Honorarium Tim / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000	1.200.000	75,00
3	Honorarium Tim / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.000.000	2.000.000	100,00
4	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	10.320.000	10.320.000	100,00
5	Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan	18.200.000	17.650.000	96,98
6	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	37.800.000	36.000.000	95,24
7	Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	31.080.000	31.080.000	100,00
8	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	163.800.000	163.800.000	100,00
9	Uang rapat/sidang	77.700.000	25.600.000	32,95
10	Uang Makan dan Minum Harian Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	108.000.000	99.750.000	92,36
	Jumlah	497.925.000	434.750.000	87,31

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.2.452.199.553,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.300.977.657,00 atau sebesar 93,83% dari anggaran.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.5.356.950.452,00 belanja barang tahun 2020 turun sebesar Rp.3.055.972.795,00 atau 57,04 %

Turunnya belanja barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2020 disebabkan karena terdapat refocusing anggaran akibat Pandemi Covid-19.

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan jasa per komponen biaya Tahun 2020 dirinci sebagai berikut:

Tabel 11
Belanja Barang Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	225.548.000	213.034.812	94,45
2	Belanja Bahan/Material	1.500.000	1.479.000	98,60
3	Belanja Jasa Kantor	591.660.000	530.689.692	89,70
4	Belanja STNK	6.240.000	5.150.090	82,53
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.785.053	45.750.000	97,79
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	193.000.000	193.000.000	100,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	99.070.000	98.160.000	99,08
8	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.000.000	20.000.000	100,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	421.657.500	416.022.253	98,66
10	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	241.250.000	241.250.000	100,00
11	Belanja Pemeliharaan	107.564.000	101.691.000	94,54
12	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.425.000	47.350.000	99,84
13	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan barang dan jasa	1.600.000	1.200.000	75,00
14	Honorarium Tim/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.000.000	2.000.000	100,00
15	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	10.320.000	10.320.000	100,00
16	Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan	18.200.000	17.650.000	96,98
17	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	37.800.000	36.000.000	95,24
18	Honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	31.080.000	31.080.000	100,00
19	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	163.800.000	163.800.000	100,00
20	Uang Makan dan Minum Harian Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	108.000.000	99.750.000	92,36
21	Uang rapat / sidang	77.700.000	25.600.000	32,95
	Jumlah	2.452.199.553	2.300.976.847	93,83

Dari tabel diatas terdapat realisasi belanja dibawah 60% dari pagu dana yang telah disediakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja uang rapat/ sidang hanya terealisasi 32,95% atau sebesar Rp.25.600.000,00 dari total pagu dana Rp.77.700.000,00. Hal ini disebabkan karena pada kegiatan pembinaan karir ASN terdapat uang rapat/ sidang baperjakat dan panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang tidak terlaksana karena pembatasan pertemuan/ rapat/ sidang

karena Pandemi Covid-19 sehingga anggaran tersebut tidak terealisasi sepenuhnya.

4.1.2.1.3 BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun).

Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.236.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.235.330.000,00 atau sebesar 99,52% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 Rp.0,00 belanja modal tahun 2020 naik sebesar Rp.235.330.000,00 atau 100%.

Belanja modal Tahun Anggaran 2020 dimanfaatkan untuk:

1. Belanja Aset Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Aset peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.36.600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.36.400.000,00,- atau 99,45 %.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 Rp.0,00 belanja modal aset peralatan dan mesin naik sebesar Rp.36.400.000,00 atau 100 %.

2. Belanja Aset Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.199.860.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.198.930.000,00,- atau 99,53 %.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 Rp.0,00 belanja modal aset gedung dan bangunan naik sebesar Rp.198.930.000,00 atau 100 %.

4.1.2.1.4 SURPLUS/DEFISIT

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2020 mengalami surplus/ (defisit) anggaran sebesar Rp (6.264.601.581,00) dan realisasinya surplus / (deficit) sebesar Rp(6.010.426.839,00) atau 95,94%. Defisit sebesar Rp(6.010.426.839,00) berasal dari Pengeluaran pembiayaan.

Dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengalami defisit sebesar

Rp(8.526.528.709,00) maka terjadi penurunan sebesar Rp(2.516.101.870,00) atau sebesar 29,5 %.

4.1.2.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2020 mengalami sisa lebih pembiayaan anggaran/silpa sebesar Rp (6.264.601.581,00) dan realisasinya silpa sebesar Rp.(6.010.426.839,00) atau 95,94%. Defisit sebesar Rp(6.010.426.839,00) berasal dari Pengeluaran pembiayaan.

Dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengalami defisit sebesar Rp(8.526.528.709,00) maka terjadi penurunan sebesar Rp(2.516.101.870,00) atau sebesar 29,5 %.

4.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

4.2.1 PENDAPATAN – LO

Pada umumnya objek pendapatan antara Pendapatan - LRA dan Pendapatan - LO hampir sama, namun pada besaran nilai yang diterima di Tahun 2020 bisa berbeda, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan hak pendapatan, sebagaimana Pendapatan LRA mengakui dengan Basis Kas, seluruh penerimaan (kas) yang diterima di Tahun 2020 pada Rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan - LRA, walaupun ada penerimaan atas pelunasan piutang dari hak pendapatan tahun-tahun sebelum Tahun 2020. Sedangkan Pendapatan - LO hanya mengakui atas pendapatan yang murni haknya Tahun 2020, sedangkan atas pendapatan tahun-tahun sebelumnya tidak diakui sebagai pendapatan-LO.

4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – 0,- 170.516.000, LO -

Pendapatan Asli Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020 bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat pada Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.170.516.000,00 atau mengalami penurunan capaian 100 % di Tahun 2020 karena terjadinya refocusing anggaran akibat Pandemi Covid-19.

Pendapatan Asli Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah atas penggunaan gedung UPT Diklat yang berlokasi di Kecamatan Talamau yang tarif retribusinya berdasarkan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor: 46 Tahun 2013 tentang Penggunaan Gedung UPT Diklat Kabupaten Pasaman Barat, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 36 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penggunaan Gedung Diklat Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan Laporan Realisasi Anggaran.

4.2.2 BEBAN

6.419.626.998,33 9.442.277.314,33

Beban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat di Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.6.419.626.998,33 dan Rp. 9.442.277.314,33 yang berupa beban operasi, beban transfer, beban non operasional dan beban luar biasa.

Laporan Operasional disusun dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingannya dengan tahun sebelumnya yaitu di Tahun 2020, dan perbandingan atas rincian masing-masing tersebut sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai 3.475.635.154,00 3.339.739.257,00

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.3.475.635.154,00 dan Rp. 3.339.739.257,00, Realisasi atas beban pegawai ini dapat dikelompokkan menjadi :

Tabel 12

Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Uraian	Beban Pegawai Tahun 2020	Beban Pegawai Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Gaji dan Tunjangan			
Beban Gaji Pokok/ Uang	1.602.279.740	1.486.532.445	115.747.295
Beban Tunjangan Keluarga	153.289.638	143.554.836	9.734.802
Beban Tunjangan Jabatan	178.545.000	152.710.000	25.835.000
Beban Tunjangan Fungsional	-	10.315.000	(10.315.000)
Beban Tunjangan Fungsional Umum	43.070.000	38.655.000	4.415.000
Beban Tunjangan Beras	82.196.700	82.703.640	(506.940)
Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	2.059.473	301.564	1.757.909
Beban Pembulatan Gaji	24.383	27.086	(2.703)
Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan	2.061.464.934,00	1.914.799.571,00	146.665.363
Beban Tambahan Penghasilan PNS			-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban	1.388.371.720	1.361.829.686	26.542.034
Jumlah Beban Tambahan Penghasilan PNS	1.388.371.720	1.361.829.686	26.542.034
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	5.150.000	(5.150.000)
Beban Uang Lembur			-
Beban Uang Lembur PNS	10.597.500	26.325.000	(15.727.500)
Beban Uang Lembur Non PNS	15.201.000	31.635.000	(16.434.000)
Jumlah Beban Uang Lembur	25.798.500	57.960.000	(32.161.500)
Total Beban Pegawai	3.475.635.154	3.339.739.257	135.895.897

Dari tabel tersebut kenaikan / penurunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban gaji dan tunjangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat meningkat sebesar Rp.146.665.363,00 hal ini disebabkan karena

adanya beberapa personil PNS yang naik pangkat, mutasi PNS ke BKPSDM dan ada 3 orang PNS baru pada tahun 2020.

2. Beban tambahan penghasilan PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat menurun sebesar Rp.26.542.034,00 hal ini disebabkan karena adanya beberapa PNS yang mutasi ke BKPSDM.
3. Beban insentif pemungutan retribusi daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat menurun sebesar Rp.5.150.000 hal ini disebabkan karena retribusi UPT Diklat tahun 2020 tidak ada karena refocusing anggaran 2020 dan pada September 2020 UPT Diklat difungsikan sebagai tempat karantina khusus pasien positif Covid-19 Orang Tanpa Gejala (OTG).
4. Beban uang lembur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat menurun sebesar Rp.32.161.500,00 hal ini disebabkan karena refocusing anggaran 2020 akibat Pandemi Covid-19.

Sedangkan jika dibandingkan antara beban Pegawai LO dengan belanja Pegawai LRA terdapat perbedaan nilai. hal ini disebabkan karena adanya beban tahun 2020 yang diakui sebagai beban utang pada tahun 2021 yaitu kekurangan gaji a.n. Andi Ritonga, S.Kom senilai Rp.1.515.972,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13

Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2020

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No	Uraian	Beban Pegawai (LO)	Belanja Pegawai (LRA)	Selisih
I	Beban Gaji dan Tunjangan			
	Beban Gaji Pokok / Uang Representasi	1.602.279.740	1.600.950.140	(1.329.600)
	Beban Tunjangan Keluarga	153.289.638	153.103.494	(186.144)
	Beban Tunjangan Jabatan	178.545.000	178.545.000	-
	Beban Tunjangan Fungsional	-	-	-
	Beban Tunjangan Fungsional Umum	43.070.000	43.070.000	-
	Beban Tunjangan Beras	82.196.700	82.196.700	-
	Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	2.059.473	2.059.473	-
	Beban Pembulatan Gaji	24.383	24.155	(228)
	Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan	2.061.464.934	2.059.948.962	(1.515.972)
II	Beban Tambahan Penghasilan PNS			-
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.388.371.720	1.388.371.720	-
	Jumlah Beban Tambahan Penghasilan PNS	1.388.371.720	1.388.371.720	-
III	Beban insentif pemungutan retribusi	-	-	-
IV	Beban Uang Lembur			-
	Beban Uang Lembur PNS	10.597.500	10.597.500	-
	Beban Uang Lembur Non PNS	15.201.000	15.201.000	-
	Jumlah Beban Uang Lembur	25.798.500	25.798.500	-
	Total Beban Pegawai	3.475.635.154	3.474.119.182	1.515.972

b. Beban Persediaan 233.463.812,00 352.078.280,00

Beban persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Uraian	Beban Persediaan Tahun 2020	Beban Persediaan Tahun 2019	kenaikan /Penurunan
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	78.573.500,00	82.474.000,00	-3.900.500
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	38.525.000,00	8.728.000,00	29.797.000
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.670.000,00	2.160.000,00	510.000,00
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.932.000,00	10.362.500,00	-1.430.500
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	75.037.312,00	131.435.280,00	-56.397.968
Beban Spanduk	3.487.000,00	8.750.000,00	-5.263.000
Beban Alat Tulis Peserta	3.510.000,00	34.880.000,00	-31.370.000
Beban Dekorasi	0,00	14.500.000,00	-14.500.000
Beban bahan/peralatan dokter pakai habis	4.300.000,00	0,00	4.300.000
Beban Persediaan Bahan Obat obatan	0,00	7.500.000,00	-7.500.000
Beban Persediaan Bahan Kimia	1.479.000,00	2.930.000,00	-1.451.000
Beban Suku cadang	0,00	0,00	0
Beban Cetak	16.950.000,00	48.358.500,00	-31.408.500
Jumlah Beban	233.463.812,00	352.078.280,00	-118.614.468

Menurunnya beban persediaan tahun 2020 disebabkan oleh karena beban persediaan pada kegiatan-kegiatan juga mengalami penurunan anggaran akibat refocusing anggaran 2020 karena Pandemi Covid-19.

Sedangkan jika dibandingkan antara beban Persediaan LO dengan belanja Persediaan LRA tidak terdapat perbedaan nilai.

c. Beban Jasa 1.547.564.619,00 3.661.669.388,00

Beban jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.1.547.564.619,00 dan Rp.3.661.669.388,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15

Beban Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Uraian	Beban Jasa Tahun 2020	Beban Jasa Tahun 2019	Kenaikan / Penurunan
Beban Jasa telepon	560.144,00	778.543,00	-218.399,00
Beban Jasa air	4.249.300,00	5.242.100,00	-992.800,00
Beban Jasa listrik	134.275.435,00	128.059.488,00	6.215.947,00
Beban Jasa Kawat / Faksimili / Internet	8.833.001,00	57.927.700,00	-49.094.699,00
Beban jasa paket/pengiriman	1.720.839,00	0,00	1.720.839,00
Beban Jasa Informasi / Promosi / Media Masa	0,00	5.500.000,00	-5.500.000,00
Beban Jasa Penggantian Transportasi	0,00	81.070.807,00	-81.070.807,00
Beban Jasa Akomodasi	0,00	118.795.000,00	-118.795.000,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	279.650.000,00	267.750.000,00	11.900.000,00
Beban belanja pajak/ retribusi	0,00	151.306.000,00	-151.306.000,00
Beban Jasa Cleaning Service	69.465.000,00	110.375.500,00	-40.910.500,00
Beban jasa buruh/ mekanik	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00
Beban Jasa medis paramedis	2.250.000,00	5.000.000,00	-2.750.000,00
Beban jasa penceramah agama	0,00	500.000,00	-500.000,00
Beban jasa pembaca Do'a/Alquran	250.000,00	2.600.000,00	-2.350.000,00
Beban jasa MC/Pembawa acara	300.000,00	3.250.000,00	-2.950.000,00
Beban jasa instruktur/pelatih	100.000,00	19.200.000,00	-19.100.000,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.150.900,00	6.102.300,00	-951.400,00
Beban Penggandaan	28.800.000,00	34.745.750,00	-5.945.750,00
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	28.900.000,00	-28.900.000,00
Beban sewa komputer dan printer	193.000.000,00	0,00	193.000.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	43.190.000,00	62.180.000,00	-18.990.000,00
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	47.970.000,00	690.418.200,00	-642.448.200,00
Beban Makanan dan Minuman Lembur	7.000.000,00	9.200.000,00	-2.200.000,00
Beban pakaian kerja lapangan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	241.250.000,00	578.258.000,00	-337.008.000,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur	0,00	639.900.000,00	-639.900.000,00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	47.350.000,00	14.600.000,00	32.750.000,00

Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.000.000,00	2.250.000,00	-250.000,00
Beban Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00
Beban Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan	17.650.000,00	47.025.000,00	-29.375.000,00
Beban Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	36.000.000,00	41.880.000,00	-5.880.000,00
Beban Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	31.080.000,00	12.950.000,00	18.130.000,00
Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	163.800.000,00	172.410.000,00	-8.610.000,00
Beban Uang Rapat / Sidang	25.600.000,00	215.100.000,00	-189.500.000,00
Beban Uang Makan dan Minum Harian Non PNS	99.750.000,00	99.925.000,00	-175.000,00
Beban kontribusi	0,00	27.950.000,00	-27.950.000,00
Jumlah	1.547.564.619,00	3.661.669.388,00	-2.114.104.769,00

Menurunnya beban jasa tahun 2020 disebabkan oleh berkurangnya beban jasa pada beberapa kegiatan karena refocusing anggaran 2020 akibat Pandemi Covid-19.

Sedangkan jika dibandingkan antara beban jasa kantor dengan belanja jasa kantor terdapat perbedaan nilai, yang disebabkan karena adanya beban tahun sebelumnya yang dibayarkan melalui belanja di Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17

Perbedaan Nilai Beban Jasa dan Belanja Jasa LO dan LRA 2020

Uraian	Beban Jasa LO Tahun 2020	Belanja Jasa LRA 2020	Selisih
Beban Jasa telepon	560.144,00	493.269,00	66.875,00
Beban Jasa air	4.249.300,00	4.787.500,00	(538.200,00)
Beban Jasa listrik	134.275.435,00	137.203.338,00	(2.927.903,00)
Beban Jasa Kawat / Faksimili / Internet	8.833.001,00	9.669.746,00	(836.745,00)
Beban Jasa Paket/ pengiriman	1.720.839,00	1.720.839,00	-
Beban Jasa Pihak Ketiga	279.650.000,00	279.650.000,00	-
Beban Jasa Cleaning Service	69.465.000,00	69.465.000,00	-
Beban Jasa medis paramedis	2.250.000,00	2.250.000,00	-
Beban jasa buruh/ tukang/ mekanik/ mandor	24.800.000,00	24.800.000,00	-
Beban jasa pembaca Do'a/Alqur'an	250.000,00	250.000,00	-
Beban jasa MC/Pembawa acara	300.000,00	300.000,00	-
Beban jasa instruktur/pelatih	100.000,00	100.000,00	-
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.150.900,00	5.150.900,00	-
Beban Penggandaan	28.800.000,00	28.800.000,00	-
Beban Sewa komputer dan printer	193.000.000,00	193.000.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman Rapat	43.190.000,00	43.190.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	47.970.000,00	47.970.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman Lembur	7.000.000,00	7.000.000,00	-
Beban pakaian kerja lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	241.250.000,00	241.250.000,00	-
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0,00	0,00	-
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	47.350.000,00	47.350.000,00	-
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	1.200.000,00	1.200.000,00	-
Beban Honorarium Tim/ Pejabat Penerima Hasil	2.000.000,00	2.000.000,00	-
Beban Honorarium Pejabat Penatausahaan	10.320.000,00	10.320.000,00	-
Beban Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	17.650.000,00	17.650.000,00	-

Beban Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	36.000.000,00	36.000.000,00	-
Beban Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	31.080.000,00	31.080.000,00	-
Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	163.800.000,00	163.800.000,00	-
Beban Uang Rapat / Sidang	25.600.000,00	25.600.000,00	-
Beban Uang Makan dan Minum Harian Non PNS	99.750.000,00	99.750.000,00	-
Jumlah	1.547.564.619,00	1.551.800.592,00	(4.235.973,00)

Dan selisih atas perbedaan nilai LO dan LRA TA 2020 senilai Rp.(4.235.973,00) tersebut ialah disebabkan karena :

- a. Pengurangan beban karena pembayaran beban tahun 2019 di tahun 2020 senilai Rp.14.188.937,- berupa :
 - Utang beban jasa listrik kantor BKPSDM Bulan Desember 2019 senilai Rp11.305.392,00 yang dibayarkan melalui SPJ Nomor : KWT/GU-1/BKPSDM/2020, tanggal 17 Februari 2020;
 - Utang beban jasa listrik UPT Diklat Talu bulan Desember 2019 senilai Rp. 1.306.800,00 yang dibayarkan melalui SPJ Nomor : KWT/GU-1/BKPSDM/2020, tanggal 17 Februari 2020;
 - Utang beban jasa air BKPSDM Desember 2019 senilai Rp.740.000,00 yang dibayarkan melalui SPJ Nomor : KWT/GU-1/BKPSDM/2019, tanggal 18 Februari 2020;
 - Utang beban jasa kawat/ Internet/faximile Bulan Desember 2019 senilai Rp.836.745,00 yang dibayarkan melalui SPJ Nomor : KWT/GU-1/BKPSDM/2019, tanggal 18 Februari 2020;
- b. Pengakuan penyesuaian utang beban akhir tahun atas beban 2020 yang belum dibayarkan senilai Rp.11.468.936,- berupa :
 - Beban Pemakaian Listrik kantor BKPSDM Bulan Desember 2020

senilai Rp. 7.253.839,-

- Beban pemakaian listrik UPT Diklat Talu bulan Desember 2020 senilai Rp. 2.430.450,-
- Beban pemakaian air BKPSDM Desember 2020 senilai Rp.201.800,00
- Beban telepon Bulan Desember 2020 senilai Rp.66.875,00.

- d. Beban Pemeliharaan 101.691.000,00 109.830.804,00
- Realisasi beban Pemeliharaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.109.830.804,00 dan Rp. 109.830.804,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17

Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019

Uraian	Beban Pemeliharaan Tahun 2019	Beban Pemeliharaan Tahun 2020	Kenaikan / Penurunan
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.681.000,00	109.830.804,00	-22.149.804,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.010.000,00	0,00	14.010.000,00
Jumlah Beban	101.691.000,00	109.830.804,00	-8.139.804,00

Menurunnya beban pemeliharaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 disebabkan oleh refocusing anggaran belanja pemeliharaan akibat Pandemi Covid-19.

Sedangkan jika dibandingkan antara beban Pemeliharaan LO dengan realisasi belanja Pemeliharaan LRA tidak terdapat perbedaan nilai.

- e. Beban Perjalanan dinas 416.022.253,00 1.235.720.845,00

Beban Perjalanan dinas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.416.022,253,00 dan Rp. 1.235.720.845,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18

Realisasi Beban Perjalanan dinas TA 2020 dan 2019

Uraian	Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020	Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.585.000,00	113.355.750,00	-80.770.750,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	383.437.253,00	1.122.365.095,00	-738.927.842,00
Jumlah Beban	416.022.253,00	1.235.720.845,00	-819.698.592,00

Menurunnya beban perjalanan dinas tahun 2020 disebabkan oleh karena adanya refocusing anggaran perjalanan dinas akibat Pandemi Covid-19.

- f. Beban Penyusutan dan Amortisasi 645.250.160,33 743.238.740,33

Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Per 31 Desember 2020 dan 2019 senilai Rp.645.250.160,33 dan Rp.743.238.740,33

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2019 senilai Rp.743.238.740,33 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp.380.371.528,00 dan Rp. 518.181.925,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 19
Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Nama Aset	Nilai Perolehan	Penyusutan Per 31 Desember 2020	Penyusutan Per 31 Desember 2019	Kenaikan /Penurunan
1	Peralatan dan Mesin	4.980.230.750,00	380.371.528,00	518.181.925,00	(8.685.712,00)
	Alat - Alat Besar	251.100.000,00	31.042.859,00	35.385.715,00	(4.342.856,00)
	Alat Berat/Besar	251.100.000,00	31.042.859,00	35.385.715,00	(4.342.856,00)
	Alat - Alat Angkutan				
	Alat Angkutan Darat Bermotor	863.223.025,00	60.344.856,00	52.061.906,00	(52.061.906,00)
	- Alat angkutan roda empat	549.900.000,00	-	38.195.715,00	(38.195.715,00)
	- Alat angkutan roda dua	313.323.025,00	-	13.866.191,00	(13.866.191,00)
	Alat bengkel dan alat ukur	-	-	-	-
	Alat pertanian	-	-	-	-
	Alat Kantor dan rumah tangga	3.324.646.485,00	288.983.813,00	430.734.304,00	(141.750.491,00)
	- Alat Kantor	413.190.000,00	22.915.600,00	40.825.166,00	(17.909.566,00)
	- Alat rumah Tangga	1.155.525.050,00	107.912.945,00	129.954.540,00	(22.041.595,00)
	- Komputer Unit	1.112.742.700,00	66.395.902,00	186.406.078,00	(120.010.176,00)
	- Peralatan komputer	383.576.960,00	32.969.245,00	-	32.969.245,00
	- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	259.611.775,00	12.187.092,00	13.686.155,00	(1.499.063,00)
	Alat Komunikasi	6.750.000,00	-	10.269.417,00	(10.269.417,00)
	Alat Studio	302.833.240,00	33.947.939,00	47.337.648,00	(13.389.709,00)
	Alat pemancar	185.195.000,00	10.816.790,00	417.000,00	10.399.790,00
	Alat peraga/praktek sekolah	14.883.000,00	1.488.300,00	1.488.300,00	-
	Alat SAR	28.800.000,00	-	-	-
	Alat Laboratorium	2.800.000,00	350.000,00	350.000,00	-

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Pasaman Barat Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp.245.888.799,00 dan Rp.196.534.107,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 20
Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	Nama Aset	Nilai Perolehan	Penyusutan Per 31 Desember 2020	Penyusutan Per 31 Desember 2019	Kenaikan / Penurunan
2	Gedung dan Bangunan	12.657.901.108,00	245.888.799,00	196.534.107,00	49.354.692,00
	Bangunan Gedung Kantor	5.057.642.558	220.212.343,00	170.857.649,00	49.354.694,00
	Bangunan Gudang	92.075.236	-	-	-
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	308.751.116	-	-	-
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.364.520.910	-	-	-
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	903.681.250	-	-	-
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.456.013.238	-	-	-
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.303.264.800	25.676.456,00	25.676.458,00	(2,00)
	Bangunan Gedung Garasi/pool	171.952.000	-	-	-

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Pasaman Barat Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 221
Penyusutan Aset Tetap Lainnya

NO	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2020	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2019	KENAIKAN /PENURUNAN
	Aset Tetap Lainnya	259.817.000,00	-	-	259.817.000,00
1	Buku dan Perpustakaan	1.811.000,00	-	-	1.811.000,00
2	Barang Bercorak Kebudayaan	30.540.000,00	-	-	30.540.000,00
3	Aset Tetap Renovasi	227.466.000,00	-	-	227.466.000,00

4.2.5 SURPLUS/ DEFISIT – LO (6.419.626.998,33) (9.271.761.314,33)

Pada tahun anggaran 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengalami defisit laporan operasional dimana jumlah beban operasional lebih besar dibandingkan dengan pendapatan LO. Defisit LO merupakan selisih Pendapatan-LO senilai Rp.0,00 dengan beban operasional senilai Rp.6.419.626.998,33 sehingga LO mengalami defisit senilai Rp (6.419.626.998,33). Nilai defisit LO ini akan menjadi pengurang ekuitas pada laporan perubahan ekuitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2019 Pendapatan-LO senilai Rp.170.516.000,00 dengan beban operasional senilai Rp.9.442.277.314,33,00 dan deficit penghapusan aset lainnya-LO senilai Rp.0,00 sehingga Laporan Operasional mengalami defisit senilai Rp(9.271.761.314,33,00)

4.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.12.443.850.985,00 dan Rp. 10.306.286.879,33,00

4.3.1 EKUITAS AWAL

10.306.286.879,33,00 11.050.912.284,66,00

Ekuitas awal pada Tahun 2020 dan 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar Rp.10.306.286.879,33,00 dan Rp. 11.050.912.284,66,00 Ekuitas awal tahun 2020 dan 2019 terdiri atas:

		TA 2020	TA 2019
1	Aset Lancar tersedia	-	-
2	Investasi dalam aset tetap	10.284.334.733,00	10.998.443.565,00
3	Investasi dalam aset lainnya	36.141.083,33	64.663.791,66
4	Kewajiban	(14.188.937,00)	(12.195.072,00)
	Jumlah	10.306.286.879,33	11.050.912.284,66

4.3.2 SURPLUS/ DEFISIT- LO

(6.419.626.998,33) (9.271.761.314,33)

Laporan Operasional tahun 2020 dan 2019 mengalami defisit sebesar Rp(6.419.626.998,33) dan Rp(9.271.761.314,33) yang merupakan selisih antara Pendapatan – LO dan beban dari laporan operasional setelah memperhitungkan surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian	2020	2019
1	Pendapatan -LO	-	170.516.000,00
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	-	170.516.000,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	170.516.000,00
2	Beban	6.419.626.998,33	9.442.277.314,33
	Beban Pegawai	3.475.635.154,00	3.339.739.257,00
	Beban Persediaan	233.463.812,00	352.078.280,00
	Beban Jasa	1.547.564.619,00	3.661.669.388,00
	Beban Pemeliharaan	101.691.000,00	109.830.804,00
	Beban Perjalanan dinas	416.022.253,00	1.235.720.845,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	645.250.160,33	743.238.740,33
	Surplus/Defisit dari Operasi	(6.419.626.998,33)	(9.271.761.314,33)
3	Kegiatan Non Operasional	-	-
	Defisit penghapusan aset lainnya-LO	-	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-	-
4	Pos Luar Biasa	-	-
	SURPLUS/DEFISIT LO	(6.419.626.998,33)	(9.271.761.314,33)

4.3.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

a. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0,00 0,00

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah Nihil.

b. SELISIH REVALUASI ASET TETAP 0,00 0,00

Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih atas penilaian nilai aset tetap, dimana selisih revaluasi aset tetap untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah Nihil.

c. KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN (206.715.685,00) 0,00

ASET TETAP

Koreksi akumulasi penyusutan asset tetap sebagai akibat dampak akumulasi asset tetap berupa akumulasi penyusutan alat rumah tangga senilai Rp.(416.189,00), akumulasi penyusutan alat SAR senilai Rp.4.320.000,00, akumulasi penyusutan alat rumah tangga senilai Rp.300.000,00, akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor senilai Rp.150.823.810,00, akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja senilai Rp.252.215.564,00 dan akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor senilai Rp.(200.527.500,00) sehingga tahun 2020 total senilai Rp.(206.715.685,00) dan tahun 2019 senilai Rp.0,00.

d. KOREKSI ASET TETAP (300.000,00) 0,00

Koreksi aset tetap Tahun 2020 senilai Rp.(300.000,-) merupakan reklas dari PM (alat rumah tangga) ke ekstrakompatabel setelah update sesuai Permendagri 108 Tahun 2016 dan tahun 2019 senilai Rp.0,00.

e. TRANSFER KELUAR ASET (267.370.000,00) 0,00

TETAP/HIBAH/DOUBLE

CATAT/PENGHAPUSAN ASET

Transfer keluar aset tetap/hibah/double catat/penghapusan aset Tahun 2020 akibat dari mutasi asset peralatan dan mesin ke Dinas Sosial berupa kendaraan dinas roda empat senilai Rp.(267.370.000,00) dan tahun 2019 senilai Rp.0,00.

f. TRANSFER MASUK ASET TETAP/ HIBAH/ KURANG CATAT/TAMBAH ASET NJOP 2.697.920.910,00 792.000,00

Transfer masuk aset tetap/hibah/kurang catat/tambah aset NJOP Tahun 2020 senilai Rp.2.697.920.910,00 merupakan transfer masuk aset tetap dari

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat ke BKPSDM berupa kendaraan dinas roda empat senilai Rp.333.400.000,00, dan dari Badan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat ke BKPSDM berupa bangunan gedung tempat pendidikan senilai Rp.2.364.520.910,00, dan tahun 2019 merupakan hibah asset tetap dari BAPD ke BKPSDM senilai Rp. 792.000,00.

g. TRANSFER MASUK AKUMULASI 0,00 (184.800,00)
PENYUSUTAN

Transfer masuk akumulasi penyusutan Tahun 2020 senilai Rp.0,00 dan tahun 2019 senilai Rp.(184.800,00)

h. TRANSFER MASUK BEBAN TAK 323.229.040,00 0,00
TERDUGA

Transfer masuk beban Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 senilai Rp.323.229.040,00 dan tahun 2019 senilai Rp.(0,00).

4.3.4 EKUITAS AKHIR 12.443.850.985,00 10.306.286.879,33

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masingnya adalah sebesar Rp.12.443.850.985,00 dan Rp. 10.306.286.879,33,00.

Nilai Ekuitas sama dengan nilai aset setelah dikurangi dengan total kewajiban selama periode tertentu.

Bila dirinci nilai ekuitas akhir tahun 2020 dan 2019 terdiri atas:

		TA 2020	TA 2019
1	Aset Lancar tersedia	-	-
2	Investasi dalam aset tetap	12.438.168.671,00	10.284.334.733,00
3	Investasi dalam aset lainnya	17.151.250,00	36.141.083,33
4	Kewajiban	(11.468.936,00)	(14.188.937,00)
	Jumlah	12.443.850.985,00	10.306.286.879,33

4.4 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 menggambarkan posisi keuangan dengan nilai Aktiva sebesar Rp.12.455.319.921,00 Kewajiban sebesar Rp.11.468.936,00 dan Ekuitas dana sebesar Rp.12.443.850.985,00, Sedangkan Neraca Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2019 menggambarkan posisi keuangan dengan nilai Aktiva sebesar Rp.10.320.475.816,33 Kewajiban sebesar Rp.14.188.937,00 dan Ekuitas dana sebesar Rp.10.306.286.879,33,00

Rincian atas masing-masing pos di neraca per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

31 Desember 2020 31 Desember 2019

4.4.1 ASET

4.4.1.1 ASET LANCAR **0,00 0,00**

Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset lancar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00, nilai tahun 2018 tidak mengalami perubahan.

4.4.1.2 ASET TETAP **12.438.168.671,00 10.284.334.733,00**

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp.12.438.168.671,00. Dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp.10.284.334.733,00 dari nilai tahun 2020 mengalami kenaikan karena adanya transfer masuk beberapa asset tetap dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat serta transfer masuk asset tetap dari Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT 2020) Jumlah tersebut merupakan saldo asset tetap yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1	Tanah	385.075.960,00	385.075.960,00
2	Peralatan dan Mesin	4.980.230.750,00	4.591.205.650,00
3	Gedung dan Bangunan	12.657.901.108,00	10.054.836.258,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	259.517.000,00	259.817.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.320.000,00	55.300.000,00
7	Akumulasi Penyusutan	-5.894.876.147,00	-5.061.900.135,00
	Jumlah	12.438.168.671,00	10.284.334.733,00

Adapun rincian per Jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

a. Aset Tetap Tanah 385.075.960,00 385.075.960,00

Jumlah tersebut merupakan nilai yang dimiliki atau dikuasai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.385.075.960,00 dan Rp.385.075.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal 2020 dan 2019	24.045.000,00	24.045.000,00
Penambahan 2020 & 2019		
Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja Pegawai kapitalisir	0,00	0,00
Belanja Barang Jasa dikapitalisir	41.356.000,00	41.356.000,00
Reklasifikasi	0,00	0,00
Koreksi tambah	319.674.960,00	319.674.960,00
Mutasi	0,00	0,00
Inventarisasi	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Utang Belanja	0	0
Jumlah Penambahan	361.030.960,00	361.030.960,00
Pengurangan 2020 dan 2019		
Penghapusan	0,00	0,00
Belanja modal yang Tidak Dikapitalisasi	0,00	0,00
Pelelangan	0	0
Koreksi kurang	0,00	0,00
Reklasifikasi	0,00	0,00
Mutasi	0,00	0,00
Realisasi Utang Belanja 2020	0,00	0,00
Jumlah Pengurangan	0,00	0,00
Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019	385.075.960,00	385.075.960,00

b. Peralatan dan Mesin 4.980.230.750,00 4.591.205.650,00

Jumlah tersebut merupakan nilai yang dimiliki atau dikuasai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.4.980.230.750,00 dan Rp. 4.591.205.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal 2020 dan 2019	4.305.398.025,00	4.305.398.025,00
Penambahan 2020 & 2019		
Belanja Modal	550.226.125,00	513.826.125,00
Belanja Pegawai kapitalisir	0,00	0,00
Belanja Barang Jasa dikapitalisir	0,00	0,00
Reklasifikasi	300.000,00	0,00
Koreksi tambah	0,00	0,00
Mutasi	411.446.100,00	78.046.100,00
Inventarisasi	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Utang Belanja	0	0
Belanja Tidak Terduga (COVID-19)	288.595.100,00	0
Jumlah Penambahan	1.250.567.325,00	591.872.225,00
Pengurangan 2020 dan 2019		
Penghapusan	270.247.500,00	270.247.500,00
Belanja modal yang Tidak Dikapitalisasi	2.300.000,00	0,00
Pelelangan	0,00	0,00
Koreksi kurang	991.100,00	991.100,00
Reklasifikasi	34.826.000,00	34.826.000,00
Mutasi	267.370.000,00	0,00
Realisasi Utang Belanja 2020	0,00	0,00
Jumlah Pengurangan	575.734.600,00	306.064.600,00
Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019	4.980.230.750,00	4.591.205.650,00

Penambahan Aset Peralatan dan mesin senilai Rp.389.025.100,00 terdiri atas:

1. Belanja modal asset peralatan dan mesin berupa belanja modal printer, barcode, UPS berdasarkan BAST nomor 602.2/ 15/ BASTB/ BKPSDM/ 2020 senilai Rp.17.400.000,00, belanja modal switch Hub berdasarkan BAST Nomor 602.2/ 16/ BASTB/ BKPSDM/ 2020 senilai Rp.15.000.000,00, dan belanja modal standing LED televisi berdasarkan BAST Nomor 602.2/ 13/ BASTB/ BKPSDM/ 2020 senilai Rp.2.000.000,-
2. Mutasi Tambah Aset Peralatan dan Mesin dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat ke BKPSDM senilai Rp.333.400.000 berupa kendaraan dinas roda empat BA 18 S sebanyak 1 unit dan Mutasi

kendaraan dinas roda empat BA 16 S dari BKPSDM ke Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat sanyak 1 unit.

3. Tranfer Masuk dari Belanja modal Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan BAST Nomor 602.2/ 11/ BASTB/ BKPSDM/ 2020 senilai Rp.174.625.000,00, BAST Nomor 602.2/ 26/ BASTB/ BKPSDM/ 2020 senilai Rp.66.350.000,00, BAST Nomor 602.2/ 21/ BASTB/ BKPSDM/ 2020 senilai Rp.28.000.000,00, BAST Nomor 602.2/ 33/ BASTB/ BKPSDM/ 2020 senilai Rp.4.800.000,00, BAST Nomor 602.2/ 23/ BASTB/ BKPSDM/ 2020 senilai Rp.1.730.100,00, BAST Nomor 602.2/ 35/ BASTB/ BKPSDM/ 2020 senilai Rp 4.800.000,00, BAST Nomor 602.2/ 28/ BASTB/ BKPSDM/2020 senilai Rp.7.490.000,00, dan BAST Nomor 602.2/ 36/ BASTB/ BKPSDM/ 2020 senilai Rp.800.000,00.

Aset Peralatan dan Mesin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp.4.980.230.750,00 terdiri atas:

Tabel 23
Daftar Aset Peralatan dan Mesin

1	Alat Alat Besar	251.100.000,00
	- Portable Generating Set	49.700.000,00
	- Stationary Generating Set	198.000.000,00
	- Pompa	3.400.000,00
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	863.223.025,00
	- Kendaraan Bermotor Penumpang	549.900.000,00
	- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	313.323.025,00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.828.326.825,00
	- Mesin Tik	11.775.000,00
	- Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	315.486.500,00
	- Alat Kantor Lainnya	85.928.500,00
	- Meubilair	340.771.250,00
	- Alat Pengukur Waktu	300.000,00
	- Alat Pembersih	24.005.100,00
	- Alat Pendingin	269.041.400,00
	- Alat Dapur	13.320.000,00
	- Alat Rumah Tangga Lainnya	505.587.300,00
	- Alat Pemadam Kebakaran	2.500.000,00
	- Meja Kerja Pejabat	139.614.825,00
	- Kursi Kerja Pejabat	78.599.250,00
	- Kursi Rapat Pejabat	19.800.000,00
	- Kursi Tamu diruangan Pejabat	21.597.700,00
4	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	494.778.240,00
	- Peralatan Studio Audio	225.035.000,00
	- Peralatan Studio Video dan Film	77.798.240,00
	- Alat komunikasi Telephone	2.750.000,00
	- Alat Komunikasi Sosial	4.000.000,00
	- Peralatan Antena SHF/Parabola	10.570.000,00
	- Sumber tenaga	174.625.000,00
5	Alat Laboratorium	17.683.000,00
	- Alat laboratorium microbiologi	2.800.000,00
	- Alat peraga praktek sekolah	14.883.000,00
6	Komputer	1.496.319.660,00
	- Komputer Jaringan	104.940.000,00
	- Personal Komputer	1.007.802.700,00
	- Peralatan Mainframe	2.513.000,00
	- Peralatan Mini Komputer	54.395.900,00
	- Peralatan Personal Komputer	90.710.360,00
	- Peralatan Jaringan	235.957.700,00
7	Alat Pendukung Pencarian	28.800.000,00
	- Tenda	28.800.000,00
	JUMLAH	4.980.230.750,00

c. Gedung dan Bangunan 12.657.901.108,00 10.054.836.258,00

Jumlah tersebut merupakan nilai yang dimiliki atau dikuasai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 terinci sebagai berikut:

Saldo awal 2020 dan 2019	11.828.259.393,00	11.828.259.393,00
Penambahan 2020 dan 2019		
Belanja Modal	814.086.715,00	580.522.775,00
Kapitalisasi Belanja Pegawai	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
Koreksi tambah	0,00	0,00
Reklasifikasi	15.555.000,00	10.575.000,00
Mutasi	2.364.520.910,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Jumlah Penambahan	3.194.162.625,00	591.097.775,00
Pengurangan 2020 dan 2019		
Penghapusan	0,00	0,00
Belanja modal tidak kapitalisasi	0,00	0,00
Koreksi kurang	0	0
Reklasifikasi	0,00	0,00
Mutasi	2.364.520.910,00	2.364.520.910,00
Realisasi Utang Belanja 2020	0,00	0,00
Hibah Ke Masyarakat	0	0
Jumlah Pengurangan	2.364.520.910,00	2.364.520.910,00
Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019	12.657.901.108,00	10.054.836.258,00

Aset Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp.12.657.901.108,00 terdiri atas :

No	Uraian	Jumlah
1	Bangunan gedung kantor	5.057.642.558
2	Bangunan Gudang	92.075.236
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	308.751.116
4	Bangunan gedung tempat pendidikan	2.364.520.910
5	Bangunan gedung tempat kerja lainnya	903.681.250
6	Bangunan gedung tempat kerja lainnya	2.456.013.238
7	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.303.264.800
8	Bangunan Gedung garasi/pool	171.952.000
	JUMLAH	12.657.901.108,00

Aset Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 24

Daftar Aset Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung UPT Diklat		7.967.033.774,00
1	Pembangunan Gedung Diklat Tahun 2012	3.184.673.000,00
2	Pemasangan Turap Tahap II	100.000.000,00
3	Belanja Modal Pembuatan Taman Gedung Diklat	199.449.000,00
4	Pembayaran Belanja Modal Gedung Diklat Tahap II	747.381.000,00
5	Belanja modal pembuatan Dapur Gedung Diklat	95.000.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan terali gedung diklat UPT Diklat	24.904.000,00
7	Belanja Modal Pembuatan Menara Air Gedung Diklat	50.000.000,00
8	Jaringan Pompa Air	19.514.000,00
9	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Besar Belanja Daya terpasang	25.575.000,00
10	Belanja Retensi 5 % Pengadaan Instalasi Listrik	5.999.950,00
11	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Gedung Diklat	114.199.050,00
12	Pengadaan Terali UPT Diklat Talu	15.125.000,00
13	Pengadaan Lampu jalan UPT	13.999.881,00
14	Pembangunan Landscape Gedung Diklat Talu	777.420.868
15	Pembangunan Gedung Diklat (Eks SPG Talu)	1.086.133.167
16	Pembangunan Gedung Diklat (Eks SPG Talu)	518.526.743
17	Pembangunan Gedung Diklat (Eks SPG Talu Lanjutan)	710.411.000
18	Perencanaan Teknis Pembangunan Landscape/Pagar Paket	49.450.000
19	Perencanaan Pembangunan Bak Penampung Air UPT	4.230.000
20	BM Pembangunan Bak Penampung Air UPT Diklat (5%)	4.992.100
21	BM Pembangunan Bak Penampung Air UPT Diklat (95%)	94.849.900
22	Pembangunan Gedung Diklat (Eks SPG Talu) (mutasi)	(1.086.133.167)
23	Pembangunan Gedung Diklat (Eks SPG Talu) (mutasi)	(518.526.743)
24	Pembangunan Gedung Diklat (Eks SPG Talu) (lanjutan) (mutasi)	(710.411.000)
25	Perencanaan Teknis Pembangunan Landscape/Pagar Paket 1 (Mutasi)	(49.450.000)
26	Sisa Perencanaan Pembangunan Bak Penampung Air UPT	1.866.175
27	Pengadaan Terali UPT Diklat Talu Tahun 2017	8.000.000
28	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pembangunan bak	750.000
29	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pembangunan	750.000
30	Belanja Pengawasan Pembangunan Sumur dan Gerbang	4.600.000
31	Pembangunan Gerbang dan Sumur UPT Diklat (5%)	74.600.000
32	Pembangunan gedung diklat (Eks SPG Talu)	1.086.133.167
33	Pembangunan gedung diklat (eks SPG Talu)	518.526.743
34	Pembangunan gedung diklat (eks SPG Talu) (Lanjutan)	710.411.000
35	Perencanaan teknis pembangunan landscape/ Pagar Paket	49.450.000
36	Pengadaan Pipa- Accessories (BTT 2020)	20.025.940
37	Pekerjaan penggalian dan pemasangan pipa air bersih (BTT	14.608.000

Gedung Kantor BKD		4.690.867.334,00
1	Belanja Modal Gedung BKD	2.659.072.000,00
2	BM Konsultan Pengawas Gedung Genset	6.985.000
3	BM Perencanaan Pembangunan Gedung Genset berdasarkan Berita acara serah terima Nomor : 602.2/ /BASTB/BKD/2015 tanggal 23 Maret 2015	6.950.000
4	Perencanaan Partisi berdasarkan Berita acara serah terima Nomor : 602.2/14.a/BASTB/BKD/2015 tanggal 23 Maret 2015	8.900.000
5	Belanja Modal pengadaan Terali kantor BKD	29.526.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Gedung Genset (95 %)	83.980.000
7	Belanja Modal Pengadaan Gedung Genset (Retensi 5 %)	4.420.000
8	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Partisi dan penyempurnaan eksterior dan interior kantor BKD (Retensi 95 %)	171.389.500
9	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Partisi dan penyempurnaan eksterior dan interior kantor BKD (Retensi 5 %)	9.020.500
10	Konsultan Pengawas Partisi dan penyempurnaan eksterior dan interior kantor BKD	8.998.000
11	BM Pengadaan 30% Pengadaan Landscape pagar, pagar, Parkir Kendaraan dinas roda 4	221.464.200
12	BM Pengadaan Landscape Pagar dan Parkiran dinas roda empat Termyn 1 63,91%	306.665.169
13	BM Pengadaan Landscape Pagar dan Parkiran dinas roda empat 95 %	231.870.631
14	BM Pengadaan Landscape Pagar dan Parkiran dinas roda empat Retensi 5%	40.000.000
15	BM Pengadaan Lantai CAT	86.500.000
16	BM Pengawas Landscape Pagar dan Parkiran dinas roda empat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 602.2/035/BASTPP/BKD/2015 tanggal 10 September 2015	23.995.000
17	Reklas dari KDP ke Gedung dan Bangunan berupa Perencanaan landscape Pagar dan Parkiran dinas roda empat	35.000.000
18	Reklas dari JIJ ke Gedung dan Bangunan berupa Instalasi listrik CAT berdasarkan BAST nomor : 602.2/42/BASTPP/BKD/2015 tanggal 11 September	15.950.000
19	Pengadaan Stiker Kaca berdasarkan BAST nomor : 602.2/56/BASTB/BKD/2015 tanggal 12 November 2015	3.992.615,00
20	Pembayaran lunas pada Fachrul Sani SH cs honor panitia pengadaan barang dan jasa pada BKD Kabupaten Pasaman Barat TA 2015 SPJ/074/GUVI/BKD/2015 SP2D nomor 387/SP2D/GU/12/2015 04/12/2015	1.800.000,00

20	Pembayaran lunas pada Fachrul Sani SH cs honor panitia pengadaan barang dan jasa pada BKD Kabupaten Pasaman Barat TA 2015 SPJ/074/GUVI/BKD/2015 SP2D nomor 387/SP2D/GU/12/2015 04/12/2015	1.800.000,00
21	Pembayaran lunas pada Khairil Huda SH honor Panitia Penerima hasil pekerjaan fisik pengadaan barang / jasa pada BKD Kab. Pasaman Barat SPJ/172/GUVI/BKD/2015 SP2D nomor	1.350.000,00
22	Tanah Timbunan Belakang Kantor BKD (95 %)	18.810.000,00
23	Tanah Timbunan Belakang Kantor BKD (5 %)	990.000,00
24	Belanja Modal Pengadaan Lantai CAT	43.230.000,00
25	Belanja Modal Pengadaan Wallpaper	19.800.000,00
26	Belanja Modal Jaringan Transmisi	49.839.119,00
27	Perencanaan Pembangunan Partisi Kantor BKD (Lanjutan)	6.345.000
28	BM uang muka 30 % Pembangunan Partisi (Lanjutan) dan Pembangunan Gedung Parkir Motor	90.261.900
29	BM Termyn I Pembangunan Partisi (lanjutan) dan Gedung Parkir Motor	146.860.350
30	BM Termyn II Pembangunan Partisi (lanjutan) dan Gedung Parkir Motor	78.039.300
31	BM Retensi 5% atas pekerjaan Pembangunan Partisi (lanjutan)	16.587.450
32	BM Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Partisi, Parkir motor dan Bak Penampng	20.700.000
33	Honor Panitia Penerima Hasil Fisik Pengadaan Barang Jasa	1.575.000
34	Honor Panitia Penerima Hasil Fisik Pengadaan Barang Jasa	1.170.000
35	Penambahan Daya Listrik 5 %	34.920.600
36	BM pembangunan tempat parkir motor tambahan	190.380.000
37	BM pengawasan pembangunan tempat parkir motor tambahan	8.200.000
38	Perencanaan pembangunan tempat parkir motor tambahan	4.980.000
39	Honor pejabat pemeriksa hasil pekerjaan parkir motor tambahan	350.000
JUMLAH		12.657.901.108

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan **0,00** **0,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai yang dimiliki atau dikuasai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 terinci sebagai berikut:

Saldo awal 2020 dan 2019	0,00	0,00
Penambahan 2020 dan 2019		
Belanja Modal	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Pegawai	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
Koreksi tambah	0,00	0,00
Reklasifikasi	0,00	0,00
Mutasi	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga (BTT)	0,00	
Jumlah Penambahan	0,00	0,00
Pengurangan 2020 dan 2019		
Penghapusan	0,00	0,00
Belanja modal tidak kapitalisasi	0,00	0,00
Koreksi kurang	0	0
Reklasifikasi	0,00	0,00
Mutasi	0,00	0,00
Realisasi Utang Belanja	0,00	0,00
Hibah Ke Masyarakat	0	0
Jumlah Pengurangan	0,00	0,00
Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019	0,00	0,00

e. Aset Tetap Lainnya **259.517.000,00 259.817.000,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019.

Aset Tetap lainnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp.259.517.000,00 terdiri atas :

1	Buku dan Perpustakaan	1.811.000
2	Barang bercorak kebudayaan	30.240.000
3	Aset tetap Renovasi	227.466.000
	JUMLAH	259.517.000,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan **50.320.000,00 55.300.000,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki atau dikuasai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal 2020 dan 2019	35.955.000,00	35.955.000,00
Penambahan 2020 dan 2019		
Kapitalisasi Belanja Pegawai	0,00	0,00
Kapitalisasi Barang dan Jasa	29.920.000,00	29.920.000,00
Koreksi tambah	0,00	0,00
Reklasifikasi	0,00	0,00
Utang Belanja	0	0
Jumlah Penambahan	29.920.000,00	29.920.000,00
Pengurangan 2020 dan 2019		
Koreksi kurang	10.575.000	10.575.000
Reklasifikasi	4.980.000,00	0,00
Jumlah Pengurangan	15.555.000,00	10.575.000,00
Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019	50.320.000,00	55.300.000,00

Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020 senilai Rp.50.320.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1	Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir UPT	12.690.000,00
2	Perencanaan Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis	4.230.000,00
3	Perencanaan Pembangunan Landscape dan Taman	4.230.000,00
4	Perencanaan Pembangunan Gazebo	4.230.000,00
5	Perencanaan Selasar UPT Diklat	9.990.000,00
6	Perencanaan Interior dan Listrik	4.990.000,00
7	Perencanaan Pembangunan Gudang UPT Diklat	4.980.000,00
8	Perencanaan Gudang BKPSDM	4.980.000,00
	JUMLAH	50.320.000,00

g. Akumulasi Penyusutan (5.894.876.147,00) (5.061.900.135,00)

Akumulasi penyusutan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp (5.894.876.147,00) dan Rp (5.061.900.135,00) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 25
Laporan Rekapitulasi Penyusutan
Sampai dengan 31 Desember 2020

No	Nama Aset	Nilai Perolehan	Penyusutan Per 1 Januari 2020	Penyusutan Per 31 Desember 2020	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2020	Nilai Buku Per 31 Desember 2020
1	Tanah	385.075.960,00	0,00	0,00	0,00	385.075.960,00
2	Peralatan dan Mesin	4.591.205.650,00	3.944.676.975,00	334.871.649,00	4.279.548.624,00	311.657.026,00
3	Gedung dan Bangunan	10.054.836.258,00	1.117.223.160,00	498.104.363,00	1.615.327.523,00	8.439.508.735,00
4	Aset Tetap Lainnya	259.817.000,00	0,00	0,00	-	259.817.000,00
5	KDP	55.300.000,00	0,00	0,00	-	55.300.000,00
			0		-	
	JUMLAH	15.346.234.868,00	5.061.900.135,00	832.976.012,00	5.894.876.147,00	9.451.358.721,00

4.4.1.3 ASET LAINNYA

17.151.250,00 36,141.083,33,00

Saldo Aset Lainnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.17.151.250,00 dan Rp.36.141.083,33,00 dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Koreksi	0	0
Saldo setelah koreksi	124.574.000,00	124.574.000,00
Penambahan 2020 dan 2019		
Belanja modal	0,00	0,00
Kapitalisasi Blj. Barang/Jasa	0,00	0,00
Reklasifikasi	-	-
Jumlah Penambahan	0,00	0,00
Pengurangan 2020 dan 2019		
Penghapusan	-	-
Amortisasi	107.422.750,00	88.432.916,67
Mutasi	0	0
tidak memenuhi nilai kapitalisasi	-	-
Jumlah Pengurangan	107.422.750,00	88.432.916,67
Saldo per 31 Desember 2020 & 2019	17.151.250,00	36.141.083,33

Atas nilai aset lainnya senilai Rp.36.141.083,33,00 terdiri dari :

a. Aset Tak Berwujud 17.151.250,00 36.141.083,33

Saldo Aset Tak Berwujud Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.17.151.250,00 dan Rp. 36.41.083,33,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26

Rincian Aset Tak Berwujud Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Pengadaan Fitur Simpeg	-	-
2	Pengadaan Operating Sytem (OS) Server	-	-
3	Pengadaan Sistem Aplikasi Kenaikan Pangkat	-	4.033.333,33
4	Pengadaan Sistem Aplikasi Tata Naskah dan Aplikasi Daring	8.500.000,00	15.961.916,67
5	Pengadaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	8.651.250,00	16.145.833,33
JUMLAH		17.151.250,00	36.141.083,33

b. Aset Lain-lain

0,00 0,00

Saldo Aset lain lain Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

4.4.2 KEWAJIBAN

4.4.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 11.468.936,00 14.188.937,00

Kewajiban jangka pendek terdiri atas :

a. Utang Beban 11.468.936,00 14.188.937,00

Utang Beban per 31 Desember 2020 senilai Rp.11.468.936,00 dan 2019 senilai Rp.14.188.937,00. Utang beban di Tahun 2019 merupakan pengakuan atas kewajiban yang pekerjaannya telah selesai dilaksanakan di Tahun 2020, namun belum direalisasikan pembayarannya. Rincian Utang Beban Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 27
Rincian Utang Beban Tahun 2020

Uraian	Utang Beban	Utang Beban		Total Utang Beban
		Barang dan	Pegawai	
Kekurangan Gaji dan tunjangan tahun 2020	-	-	1.515.972	1.515.972,00
Pemakaian Listrik BKPSDM Desember 2020	-	7.253.839	-	7.253.839,00
Pemakaian Listrik UPT Diklat Desember 2020	-	2.430.450	-	2.430.450,00
Pemakaian Air Desember 2020	-	201.800	-	201.800,00
Pemakaian Telepon Desember 2020	-	66.875	-	66.875,00
Jumlah	-	9.952.964,00	1.515.972,00	11.468.936,00

1 Utang Beban Pegawai, Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 senilai Rp11.468.936,00 terdiri atas:

- Utang beban pegawai kekurangan gaji dan tunjangan a.n. Andi Ritonga, S.Kom tahun 2020 senilai Rp.1.515.972,-
- Utang beban listrik kantor BKPSDM pemakaian bulan Desember Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.7.253.839,-
- Utang beban listrik UPT DIKLAT pemakaian bulan Desember Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.2.430.450,-
- Utang beban air kantor pemakaian bulan Desember Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.201.800,-
- Utang beban telepon kantor pemakaian bulan Desember Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.66.875,-

3 Utang beban barang dan jasa tahun 2019 yang dibayar di tahun 2020 dengan rincian :

- a. Utang Beban jasa listrik BKPSDM pemakaian Desember 2019 senilai Rp.11.305.392,00 yang dibayarkan melalui SPJ nomor : /KWT/GU-1/BKPSDM/2020, tanggal Februari 2020;
- b. Utang Beban jasa listrik UPT Diklat pemakaian Desember 2019 senilai Rp.1.306.800,00 yang dibayarkan melalui SPJ nomor : /KWT/GU-1/BKPSDM/2020, tanggal Februari 2020;
- c. Utang beban jasa air pemakaian tahun 2019 senilai Rp.740.000,00 yang dibayarkan melalui SPJ nomor : /KWT/GU-1/BKPSDM/2020 tanggal Februari 2020;
- d. Utang Beban jasa kawat/Faksimili/internet pemakaian Desember 2019 senilai Rp.836.745,00 yang dibayarkan melalui SPJ nomor : /KWT/GU-1/BKPSDM/2020, tanggal Februari 2020.

e. Kewajiban untuk dikonsolidasikan

4.4.3 EKUITAS	12.443.850.985,00	10.306.286.879,33
----------------------	--------------------------	--------------------------

Ekuitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2020 dan 2019 senilai Rp.12.443.850.985,00 dan Rp. 10.306.286.879,33,00 merupakan saldo ekuitas akhir yang berasal dari Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2020 dan 2019 sebagaimana yang telah diuraikan pada Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Kedudukan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2016, terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun ASN
 - b. Sub Bidang Mutasi ASN
 - c. Sub Bidang Kepangkatan ASN
4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir ASN
 - b. Sub Bidang Disiplin dan Pembinaan ASN
 - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
5. Bidang Data dan kesejahteraan ASN
 - a. Sub Bidang Data dan Dokumentasi ASN
 - b. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan ASN dan Korpri
6. Kepala UPT Diklat
 - a. KTU UPT Diklat

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA :

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, yang meliputi perencanaan dan perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di bidang kepegawaian daerah ;

sumber daya manusia serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan;

- d. mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten Pasaman Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. merumuskan peningkatan kinerja pegawai dan penegakkan disiplin;
- f. melaksanakan teknis administratif dan fungsional, ketatausahaan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

SEKRETARIAT

Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Selanjutnya Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pengkoordinasian tugas-tugas kedinasan dengan bidang-bidang serta melakukan pelayanan terhadap urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris, sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Sub Bagian Progran dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan; Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan serta mempersiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dan penyusunan laporan kegiatan dan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI ASN

Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Bidang Pengadaan dan Mutasi mempunyai tugas berkaitan dengan perencanaan, pengadaan dan mutasi ASN.

a. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun ASN

Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun ASN dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, pengadaan ASN, usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan pelaksanaan pengangkatan calon ASN daerah serta menghimpun dan mengolah data penetapan pensiun;

b. Sub Bidang Mutasi ASN

Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Mutasi ASN.

c. Sub Bidang Kepangkatan ASN

Sub Bidang Kepangkatan ASN dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN. Kepala Sub Bidang Kepangkatan ASN mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penetapan kepangkatan ASN.

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR ASN

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan melalui sekretaris badan. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN mempunyai tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan karir ASN.

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir ASN

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pembinaan dan pengembangan karir ASN. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir mempunyai tugas melaksanakan bidang perencanaan dan pengembangan karir ASN.

b. Sub Bidang Disiplin dan Pembinaan ASN

Sub Bidang Disiplin dan Pembinaan ASN dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN. Kepala Sub Bidang Disiplin dan Pembinaan ASN mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis terkait penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian manajemen ASN serta menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) mempunyai tugas terkait perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan struktural, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis serta bimbingan teknis badan;

BIDANG DATA DAN KESEJAHTERAAN ASN

Bidang Data dan Kesejahteraan ASN dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan melalui sekretaris badan. Bidang Data dan Kesejahteraan ASN mempunyai tugas berkaitan dengan data ASN, dokumentasi dan status ASN, kesejahteraan ASN dan Korpri.

a. Sub Bidang Data dan Dokumentasi ASN

Sub Bidang Data dan Dokumentasi ASN dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang data dan kesejahteraan ASN. Kepala Sub Bidang Data dan Dokumentasi ASN mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis terkait pengolahan data dan dokumentasi ASN.

b. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN

Sub Bidang Penilaian dan Penghargaan ASN dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang Data dan Dokumentasi ASN. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penghargaan ASN mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman, petunjuk teknis penilaian kinerja dan penghargaan ASN.

c. Sub Bidang Kesejahteraan ASN dan Korpri

Sub Bidang Kesejahteraan ASN dan Korpri dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang Data dan Dokumentasi ASN. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan ASN dan Korpri mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman, petunjuk teknis terkait pengurusan kelengkapan identitas pegawai dan Korpri.

Rincian Anggaran 2020

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	AKUN ANGGARAN	DPA AWAL	DPPA REFOCUSING I	DPPA REFOCUSING II	DPPA
	Tanggal	31 Desember 2019	09-Apr-20	8 Mei 2020	02-Nov-20
A	Pendapatan	147.779.438	147.779.438	0	0
B	Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)	3.864.956.218	3.864.956.218	3.554.322.537	3.549.867.028
C	Belanja Langsung	5.982.762.000	5.552.106.000	2.208.484.553	2.714.734.553
	1. Belanja Pegawai	741.555.000	741.555.000	498.484.000	524.000.000
	2. Belanja Barang/jasa	5.006.607.000	4.575.951.000	1.475.400.553	1.954.274.553
	3. Belanja Modal	234.600.000	234.600.000	234.600.000	236.460.000
	Surplus/(defisit)	9.699.938.780	9.269.282.780	5.762.807.090	6.264.601.581

Pada DPPA Refocusing I, Anggaran dikurangi senilai Rp.430.656.000,- dari DPA Awal, DPPA Refocusing II dikurangi lagi senilai Rp.3.937.131.690,- dari DPA Awal dan DPPA Akhir dikurangi senilai Rp.3.435.337.199,- dari DPA Awal. Terjadinya Refocusing tersebut disebabkan oleh kebutuhan penanganan untuk Pandemi Covid-19.